



Buletin Parlementaria



3 Susun Kebijakan
Demi Bangsa



4 Apresiasi
Peluncuran Buku
Komisi III

Tinjau TKP 7 Jenazah Di Kali Bekasi



Nomor 1313/I/X/2024 Oktober 2024



9 772614 339005



Tinjau TKP 7 Jenazah Di Kali Bekasi

Komisi III DPR RI meninjau Tempat Kejadian Perkara (TKP) ke Kali Bekasi, Jati-asih, Bekasi, Jawa Barat, yang menjadi tempat ditemukannya tujuh jenazah remaja laki-laki, Selasa (24/9). Rombongan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dan dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi III, antara lain Arteria Dahlan, Nazaruddin Dek Gam, Habib Aboe Bakar Al Habsyi, I Wayan Sudirta, serta Heru Widodo.

Rombongan ini juga didampingi oleh Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Dani Hamdani, yang memberikan penjelasan mengenai kasus tersebut. Menurut Habiburokhman, tujuan utama dari peninjauan ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai kejadian tersebut. "Kami ingin lebih tahu kejadian yang sebenarnya, Pak Ka-polres," ungkap Habiburokhman di sela-sela kunjungannya.



Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, beserta Tim Komisi III meninjau Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Kali Bekasi, Jawa Barat.



Ia menekankan bahwa Komisi III DPR RI meminta agar penyelidikan terhadap kasus ini dilakukan secara transparan. "Kami berharap penyelidikan dilakukan secara terbuka, termasuk latar belakang kejadian ini harus jelas. Kami datang ke sini untuk melihat langsung situasi di lapangan," jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Habiburokhman juga menegaskan bahwa transparansi sangat penting agar tidak muncul spekulasi atau tuduhan yang tidak berdasar terkait kasus ini. Sebelumnya, diketahui tujuh jenazah yang ditemukan adalah remaja laki-laki yang diduga menceburkan diri ke sungai karena ketakutan saat melihat patroli polisi. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, mengungkapkan bahwa kejadian ini sedang dalam penyelidikan lebih lanjut. — uf/rdn

Scan QR untuk berita selengkapnya



Susun Kebijakan Demi Bangsa



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat menjadi Pembina Upacara Pemantapan Nilai-Nilai (Taplai) Kebangsaan bagi Anggota DPR RI dan DPD RI terpilih Periode 2024-2029 di Jakarta, Sabtu (21/9/2024).

FOTO: JKA/PDT

Ketua DPR RI Puan Maharani menjadi Pembina Upacara Pemantapan Nilai-Nilai (Taplai) Kebangsaan bagi Anggota DPR RI dan DPD RI terpilih Periode 2024-2029. Puan mengingatkan agar wakil rakyat fokus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Upacara Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR dan DPD terpilih ini diselenggarakan oleh KPU RI dan Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) di Jakarta, Sabtu (21/9). Kegiatan ini diikuti oleh Anggota DPR RI dan DPD RI terpilih periode 2024-2029.

DPR RI dan DPD RI sebagai lembaga negara yang juga lembaga politik, menurut Puan, harus dapat meletakkan

kebijakan negara yang dihasilkannya dengan tetap mengedepankan kepentingan yang lebih besar. "Setiap kebijakan negara harus ditempatkan bagi kepentingan bangsa dan negara, dan bukannya hanya untuk kalangan sendiri atau kelompok sendiri tetapi harus ditempatkan dalam kepentingan bersama bangsa dan negara," tukasnya.

Di sisi lain, anggota DPR dan DPD terpilih diingatkan untuk berperan aktif dalam membangun ketaatan pada hukum karena Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai lembaga negara yang juga membentuk UU, disampaikan Puan, maka DPR dan DPD berkewajiban menjalankan tugas dan kewenangan yang harus selaras dan taat pada UU.

— **bia/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH
Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si. (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
M. Ibnukhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI
Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR
Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom,
Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos.,
Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nachen Ivan, S.I.Kom,
Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom.,
Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi
Setianto, Taufan Syahrull, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rim bani,
Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie,
Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien,
Yasmin Nabila

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman,
R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Alfdhillah, Geratdi Opie,
Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh Farhan Nur Fikri

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah,
Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.
Indah Ekawati, S.I.Kom.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Apresiasi Peluncuran Buku Komisi III



FOTO: AFEV/PDT

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menghadiri Peluncuran Buku Komisi III DPR RI di Gedung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Di akhir periode masa jabatan 2019-2024, Komisi III DPR RI meluncurkan buku yang berjudul 'Transformasi Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia: Komisi III DPR RI Periode Tahun 2019-2024 dalam Sebuah Catatan'. Hal ini pun disambut baik oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang menilai baik produktivitas Komisi III DPR RI di akhir masa jabatan.

"Kita bersyukur bahwa dalam periode 2019-2024 Komisi III yang mengalami juga saat-saat dimana skala nasional dan global pernah mengalami masa sulit di jaman Covid-19 dan lain-lain. Komisi 3 tetap produktif

bisa berbuat untuk rakyat dan juga dengan mitra secara bahu membahu bekerja bersama-sama," kata Dasco usai menghadiri Peluncuran Buku Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga menilai selama periode masa jabatan 2019-2024 Komisi III DPR RI aktif melakukan koordinasi dengan Pimpinan DPR, baik dalam hal pembentukan produk Undang-Undang hingga isu-isu strategis di DPR.

"Selama ini koordinasi Komisi III dengan pimpinan DPR itu sangat baik, saya pikir segala sesuatu dikomunikasikan baik ketika mau mengajukan sebuah acara pengajuan surat maupun

kemudian ketika terjadi hal-hal yang sifatnya mendadak itu semua juga secara cepat dikomunikasikan kepada pimpinan dan tidak pernah ada satu masalah sampai dengan saat ini," terang Legislator Dapil Banten III ini.

Lebih lanjut, Dasco pun menerangkan kedepan akan lebih banyak tantangan yang harus dihadapi dengan optimis oleh Komisi III. "Tentunya di masa depan akan periode 2024-2029 akan terjadi banyak dinamika yang kemudian akan menimbulkan tantangan-tantangan baru dan tapi saya yakin dengan niat dari teman-teman Komisi III yang baru maupun yang masih bertahan itu tentunya akan terlewati dan bisa terlampaui," pungkasnya. **we/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Hadiri *International Youth Summit*



Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar saat menghadiri *International Youth Summit* ke-4 yang diprakarsai oleh *Organization Islamic Cooperation (OIC) Youth Indonesia*.

FOTO: IST/PDT

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menghadiri *International Youth Summit* ke-4 yang diprakarsai oleh '*Organization Islamic Cooperation*' (OIC) Youth Indonesia, organisasi payung bagi seluruh organisasi pemuda Islam di Indonesia. Gus Imin, sapaan akrabnya, mengaku bangga atas kontribusi OIC *Youth Indonesia* yang telah memberi dampak positif bukan hanya bagi pemuda Indonesia, tapi juga dunia.

"Saya sungguh ikut berbangga dan bersyukur kehadiran Allah SWT, '*OIC Youth Indonesia*' telah berkontribusi dan telah memberikan berbagai kegiatan yang produktif dan positif, bukan saja untuk kaum muda Indonesia tetapi berperan bagi kaum muda di seluruh dunia," katanya di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9).

Secara khusus, Gus Imin mengucapkan terima kasih kepada seluruh para pendiri OIC *Youth Indonesia* yang telah menjaga sekaligus menghidupkan organisasi tersebut dalam kurun

20 tahun terakhir.

"Terima kasih kepada seluruh pendiri sehingga dalam 20 tahun organisasi ini mampu berkiprah dengan amat sangat baik. Salah satu pendiri yang hadir adalah Tatam Taufik Lubis," tegas Politisi Fraksi PKB ini.

Gus Imin menyatakan, kepedulian seluruh anggota OIC dan segenap elemen bangsa sebagai bagian dari warga dunia dituntut untuk lebih sungguh-sungguh lagi khususnya menghadapi berbagai perubahan-perubahan yang dramatis ditingkat global. **we/rdn**



NPWP Diretas, 'Pukulan' bagi Pengamanan Data

Belakang ini ramai diberitakan atas dugaan bocornya data NPWP yang mencuat karena pendiri *Ethical Hacker Indonesia*, Teguh Aprianto, mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums. Melalui akun X @secgtron, ia menyebut sebanyak enam juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada tanggal 18 September 2024.

Selain NPWP, data yang juga terseret, di antaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor telepon, surat elektronik (email), dan data lainnya. Harga jual seluruh data itu mencapai Rp150 juta.

Menanggapi itu, Anggota Komisi I DPR RI Ali Imron Bafadal menilai kejadian atas diretasnya data NPWP menjadi 'pukulan' kembali bagi pemerintahan Indonesia. Hal itu ia sampaikan kepada Kementerian Kominfo yang hadir dalam Raker Komisi I DPR RI.

"Bahkan mereka kelompok ini pernah menantang kita untuk menunggu



Anggota Komisi I DPR RI Ali Imron Bafadal dalam Raker Komisi I DPR RI bersama Menko Polhukam dan Kementerian Kominfo di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2024).

kan untuk digerebek gitu Pak," ujar Ali Imron dalam Raker Komisi I DPR RI bersama Menko Polhukam dan

Kementerian Kominfo di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/9).

Maka dari itu, dirinya berharap, akan ada koordinasi lebih guna mengambil tindakan lebih lanjut. Terlebih menurutnya, Bjorka sendiri pernah ditindak dengan penahanan di luar negeri. "Nah dengan koordinasi dari Kominfo ini kita ingin hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi," imbuhnya.

Selain itu, ia juga berharap Menkopolkum dapat memberikan kebijakan terkait koordinasi antara Kementerian Kominfo dengan lembaga seperti BSSN di masa mendatang. Agar ketika kejadian serupa terjadi, tidak ada tumpang tindih maupun saling memojokkan siapa yang benar maupun siapa yang salah.

hal/rdn



SELAIN NPWP, DATA YANG JUGA TERSERET, DI ANTARANYA NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK), ALAMAT, NOMOR TELEPON, SURAT ELEKTRONIK (EMAIL), DAN DATA LAINNYA. HARGA JUAL SELURUH DATA ITU MENCAI RP150 JUTA.

Ali Imron Bafadal

Anggota Komisi I DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Capaian PTSL Jawa Timur Melebihi Target

Anggota Komisi II DPR RI, Riswan Tony, mengapresiasi pencapaian luar biasa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ia menegaskan bahwa PTSL di Jawa Timur telah mencapai lebih dari 100 persen, dengan total sertifikat yang diterbitkan berkisar antara 20.000 hingga 30.000 lembar.

“Buat saya sendiri pribadi, sudah untuk kesekian kalinya, kita ke Provinsi Jawa Timur. Untuk kali ini luar biasa, pencapaian khususnya di program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) mereka udah 100 persen bahkan lebih, sekitar 20 ribu hingga 30 ribu sertifikat,” kata Riswan Tony usai mengikuti Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Senin (23/9).

Lebih lanjut, Riswan menambahkan bahwa semua 38 Kantor Pertanahan (Kantah) di Jawa Timur telah berkontribusi dalam program ini.



Anggota Komisi II DPR RI, Riswan Tony, saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Senin (23/09/2024).

Meskipun, awalnya hanya 13 (tiga belas) Kantor yang diprioritaskan.

“Dan memang, kalau melihat dari

beberapa Kantor Wilayah (Kanwil) yang ada Jawa Timur ini, memang rata-rata orangnya bekerja keras. Jadi orang dari manapun masuk sini, mengikuti situasi. Kedua, memang medannya juga, karena ini di Jawa, hampir sebagian besar adalah jangkauannya bagus tentang sertifikat elektronik juga mereka nomor satu di Indonesia. Buat saya, ini *surprise* dan kita kasih *reward* bahwa mereka tadinya cuma 13 Kantor Pertanahan (Kantah) yang diprioritaskan, ternyata semuanya dari 38 itu, semua sudah melakukan itu. Ini luar biasa,” ujarnya.

Namun, di balik kesuksesan ini, Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga mengingatkan adanya tantangan dalam pelaksanaan PTSL di lapangan.

aas/rdn



BUAT SAYA SENDIRI PRIBADI, SUDAH UNTUK KESEKIAN KALINYA, KITA KE PROVINSI JAWA TIMUR. UNTUK KALI INI LUAR BIASA, PENCAPAIAN KHUSUSNYA DI PROGRAM PTSL (PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP) MEREKA UDAH 100 PERSEN BAHKAN LEBIH, SEKITAR 20 RIBU HINGGA 30 RIBU SERTIFIKAT.



Riswan Tony

Anggota Komisi II DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Setujui 79 RUU Dibawa ke Paripurna



FOTO: GER/PDT

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat pengesahan 79 Rancangan Undang-Undang (RUU) soal Kabupaten/Kota pada pembahasan tingkat pertama untuk dibawa ke pembahasan tingkat selanjutnya yakni Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Komisi II DPR RI menyetujui 79 Rancangan Undang-Undang (RUU) soal Kabupaten/Kota pada pembahasan tingkat pertama untuk dibawa ke pembahasan tingkat selanjutnya yakni Rapat Paripurna. Adapun 79 kabupaten dan kota yang akan memiliki undang-undang baru itu berada di 10 provinsi, yakni Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat.

“Saya ingin bertanya kepada kita semua apakah kita menyetujui 79 RUU

Kabupaten/Kota ini di tingkat pertama dan kemudian kita usulkan untuk disahkan disetujui pada tingkat dua, setuju bapak ibu sekalian?” tanya Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Selasa (24/9), yang dijawab ‘setuju’ oleh seluruh peserta rapat.

Persetujuan itu dilakukan setelah seluruh fraksi DPR RI, Komite I DPD RI, dan Menteri Dalam Negeri menyampaikan pandangannya masing-masing. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan 79 RUU Kabupaten/Kota itu dirancang agar puluhan kabupaten/kota itu memiliki landasan hukum yang

sesuai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Mengingat, menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu sebagian dasar hukum pembentukan beberapa provinsi, kabupaten, dan kota, sejauh ini masih menggunakan ketentuan dari masa Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. “Sehingga dapat menghindari konflik hukum dan administrasi yang mungkin timbul akibar dasar hukum yang tak lagi relevan dengan saat ini,” kata Junimart dalam kesempatan yang sama.

[we/rdn](https://www.werdn.com)

Scan QR untuk berita selengkapnya



Tinjau Stabilitas Harga Pangan di Cimahi



FOTO: PUN/PDT

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini saat mengecek ketersediaan bahan dan harga pangan ke Pasar Atas Cimahi, Kota Cimahi.

Komisi IV DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik terakhirnya di periode ini secara resmi berkunjung ke Pasar Atas Cimahi, Kota Cimahi dalam rangka meninjau aspek ketersediaan, bahan, harga serta aksesibilitas harga dari masyarakat. Termasuk juga menyerap aspirasi dari para pedagang.

Dan sejauh berdasarkan peninjauan lapangan oleh Komisi IV DPR RI yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini itu, keseluruhan aspek tersebut

masih dalam kategori aman.

“Artinya bahan-bahan ada, lalu kemudian beras ada, telur juga tidak terlalu mahal. Ikan, daging sapi, daging ayam, aman semuanya, cabai dan lain sebagainya aman, harganya juga bisa diakses oleh masyarakat,” ujar Anggia usai tinjauan, Rabu (18/9).

Namun demikian yang sempat jadi temuan, ungkap Politisi Fraksi PKB tersebut, ternyata para pedagang khususnya pedagang ayam mengeluhkan adanya pedagang liar di terotoran luar pasar yang dianggap mengganggu usaha serta

mempengaruhi stabilitas harga dan kualitas pangan yang dijual.

Merespon keluhan pedagang, tandas Anggia, Komisi IV DPR RI lantas bertindak cepat dengan mendesak Sekda Kota Cimahi yang kebetulan sedang berada dalam satu rombongan untuk segera menangani.

“Dan mereka memang sudah ditangani, sudah bersama dengan Satpol PP untuk ditertibkan. Selain itu juga kita cek kesehatan atau keamanan bahan-bahan baik itu buah, sayuran, daging, beras melalui labnya Bapanas yang ada disitu,” tutur Anggia. — **pun/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya

PUPR Harus Lebih Perhatikan Pembangunan di Daerah



FOTO: AFR/PDT

Anggota Komisi V Boyman Harun saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) Komisi V dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Komisi V DPR RI menyetujui tambahan anggaran tahun 2025 Kementerian PUPR sebesar Rp40,59 triliun. Menanggapi tambahan anggaran tersebut, Anggota Komisi V Boyman Harun mengingatkan Kementerian PUPR agar benar-benar memberikan perhatian pada pembangunan di daerah-daerah yang membutuhkan.

“Saya hanya berharap kepada Pak Menteri beserta jajaran, agar penambahan ini benar-benar diberikan kepada daerah-daerah yang

membutuhkan, termasuk usulan-usulan yang disampaikan Anggota DPR Komisi V,” kata Boyman dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9).

Boyman menambahkan, pembangunan fasilitas pendidikan harus menjadi prioritas utama bagi PUPR dengan adanya penambahan anggaran tersebut. Terutama, sekolah-sekolah di desa-desa yang memiliki kondisi yang memprihatinkan.

“Semoga dengan ada tambahan

40 triliun ini, fasilitas-fasilitas umum yang sifatnya pendidikan seperti sekolah-sekolah agar menjadi prioritas utama diberikan anggaran tersebut,” harap Politisi Fraksi PAN tersebut.

Sementara itu, terhadap kinerja di tahun 2024, Boyman mengingatkan PUPR untuk segera menyelesaikan program-program yang belum rampung. Seperti, jembatan gantung di Kalimantan Barat, hingga proyek abrasi pengaman pantai yang masih menunggu penyesuaian anggaran untuk pelelangan. — **bia/rdn**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Rusun ASN di IKN Hampir Selesai



FOTO: AAR/PDT

Tim Kunspek Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw saat meninjau progress pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (12/09/2024).

Komisi V DPR RI melakan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw menyoroti tiga hal fokus utama kunjungan ini yaitu akses tol menuju IKN, Bandara IKN, dan Rusun ASN.

Dalam hal pembangunan Rusun ASN, ia menekankan bahwa desain struktural dan kualitas konstruksi harus memenuhi standar teknis menjamin keamanan dan kenyamanan penghuni.

“Dalam kunjungan hari ini kami lihat sangat berbeda jauh dengan empat bulan lalu waktu rombongan mengadakan kunjungan spesifik ke (IKN) ini. Menurut saya melihat progres pembangunan tadi hampir semua persiapan untuk (pemindahan) ASN terkait perumahan, rumah susun, dan lain sebagainya itu sudah betul-betul hampir final. Mudah-mudahan laporan Menteri PUPR bahwa Desember 2024 itu (diharapkan) bisa selesai semuanya,” pungkas Roberth se usai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi V di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (12/9).

Adapun proyek pembangunan Rumah Susun ASN yang saat ini sedang berjalan, diawasi langsung oleh Menteri dan Dirjen di KemenPUPR. Sehingga, secara kualitas bangunan yang sedang berjalan maupun sudah selesai betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan.

“Harapan kami bukan cuma di sini tapi juga di seluruh infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah di daerah itu harus seperti ini agar pengawasan yang betul-betul agar kualitas daripada bangunan itu betul-betul sesuai dengan harapan kita semua,” tambah Politisi Fraksi Partai Nasdem itu. — aar/rdn



BUMN Energi dan Logistik Siap Sukseskan MotoGP

Kawasan Mandalika telah membuktikan dirinya sebagai destinasi *Sport Tourism* pertama di Indonesia yang diakui secara global. Pembangunan Sirkuit Mandalika memberikan dampak yang sangat signifikan, tidak hanya bagi Nusa Tenggara Barat, juga bagi Indonesia secara keseluruhan. Sirkuit ini telah menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi lokal, terutama dalam sektor pariwisata dan UMKM.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto mengapresiasi kesiapan BUMN Energi dan Logistik dalam menunjang pembangunan The Mandalika sebagai destinasi pariwisata kelas dunia dan terwujudnya ekosistem "*Sport Tourism*" khususnya pada ajang MotoGP Mandalika 2024 di Sirkuit Mandalika, 27-29 September 2024 mendatang.

"Dari PLN, kita ingin mendengar pasokan listrik untuk persiapan event



Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke NTB Adisatrya Suryo Sulisto, dalam foto bersama usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke Lombok, NTB.

ini itu cukup atau tidak dan tadi dari pemaparannya sangat sangat cukup. Untuk Pertamina, tadi juga menyampaikan ketersediaan BBM dan

segala bahan bakar yang diperlukan," ujar Adisatrya usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa (24/9).

Berdasarkan hasil pemaparan, Pertamina berupaya mengantisipasi potensi peningkatan kebutuhan energi pada event Mandalika 2024, sejalan dengan hal ini dapat diproyeksikan kenaikan penjualan pada saat berlangsungnya event MotoGP.

Adisatrya memandang bahwa penyelenggaraan ajang MotoGP Mandalika 2024 akan berjalan dengan baik dengan dukungan dari perusahaan-perusahaan BUMN. "Saya cukup yakin dengan persiapan perusahaan-perusahaan BUMN ini. Tentunya kami merasa penyelenggaraan ini akan baik," tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

DARI PLN, KITA INGIN MENDENGAR PASOKAN LISTRIK UNTUK PERSIAPAN EVENT INI ITU CUKUP ATAU TIDAK DAN TADI DARI PEMAPARANNYA SANGAT SANGAT CUKUP. UNTUK PERTAMINA, TADI JUGA MENYAMPAIKAN KETERSEDIAAN BBM DAN SEGALA BAHAN BAKAR YANG DIPERLUKAN.

Adisatrya Suryo Sulisto
Anggota Komisi VI DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



ysm/rdn

Tinjau Kinerja Peruri dalam Penugasan SPBE

Komisi VI DPR RI melakukan peninjauan progres Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ke Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) di Karawang, Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi VI DPR, Harris Turino, menyampaikan Komisi VI berfokus pada sejumlah hal, yaitu kinerja yang dilakukan Perum Peruri selama ini, kasus-kasus terkait seperti maraknya kegagalan pembubuhan materai elektronik (*e-materai*) pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), hingga penugasan terkait SPBE.

“Di sini masalahnya cukup krusial karena anggarannya belum tersedia. Tetapi, Peruri sudah diminta dulu untuk menyelesaikan banyak hal terkait dengan kebutuhan satu data Indonesia di 11 Kementerian dan Lembaga. Padahal anggarannya di Kementerian dan Lembaga belum ada, sehingga Kementerian dan Lembaga belum bisa menerbitkan kontraknya,



FOTO: ICA/PDT

Anggota Komisi VI DPR, Harris Turino, saat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VI DPR ke Peruri di Karawang, Jawa Barat, Rabu (18/9/2024).

sementara atas nama percepatan, Peruri harus bekerja terlebih dahulu,” papar Harris usai Kunjungan Kerja

Spesifik (Kunspek) Komisi VI DPR ke Peruri di Karawang, Jawa Barat, Rabu (18/9).

Harris mempertanyakan hal tersebut, terutama terkait pihak yang akan bertanggung jawab dalam melakukan pembayaran dan besaran anggaran yang akan dikeluarkan oleh Peruri. Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan itu menjelaskan bahwa penugasan-penugasan seperti yang diberikan kepada Peruri tersebut, seharusnya sudah dari awal dianggarkan.

“Dan tentu saja, Satu Data Indonesia bukan hanya tentang data, tetapi kedaulatan negara. Ini adalah hal yang sangat krusial, karena pihak yang menguasai data adalah pihak yang menguasai negara. Ini harus ditata sebaik-baiknya,” jelas Harris.

ica/rdn



DI SINI MASALAHNYA CUKUP KRUSIAL KARENA ANGGARANNYA BELUM TERSEDIA. TETAPI, PERURI SUDAH DIMINTA DULU UNTUK MENYELESAIKAN BANYAK HAL TERKAIT DENGAN KEBUTUHAN SATU DATA INDONESIA DI 11 KEMENTERIAN DAN LEMBAGA.



Harris Turino

Anggota Komisi VI DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Ketersediaan Bahan Bakar Rendah Karbon di Sulawesi

Komisi VII DPR RI memastikan kesiapan dan ketersediaan bahan bakar rendah karbon di wilayah Sulawesi. Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) Komisi VII, Andi Yuliani Paris yang mengunjungi PT *Pertamina Marketing Operation Region* (MOR) VII di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

“Kami Komisi VII DPR hari ini berkunjung dan berdiskusi dengan Pertamina MOR VII juga dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hadir direktur hilir migas dan direktur pembangunan dan perencanaan infrastruktur migas dan juga ada BPH Migas. Tujuan kami adalah, pertama, terkait dengan *roadmap* dari Pertamina MOR VII untuk bioenergi yang termasuk bioetanol dan tadi juga dipresentasikan terkait dengan BBM rendah sulfur,” ujar



Ketua Tim Kunsfik Komisi VII DPR RI, Andi Yuliani Paris saat mengunjungi PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VII di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.



UNTUK BBM RENDAH SULFUR INI KAN TENTUNYA HARUS DILAKUKAN UPAYA REVITALISASI KEMBALI KILANG-KILANG YANG DIMILIKI OLEH PERTAMINA. UNTUK SULAWESI, SUPLAINYA MAYORITAS DARI KILANG DI BALIKPAPAN DAN CILACAP. KILANG-KILANG INI MASIH DIUPAYAKAN MENGHASILKAN BBM RENDAH SULFUR.

Andi Yuliani Paris Anggota Komisi VII DPR RI

Anggota Komisi VII DPR RI tersebut di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (20/9).

Legislator dari Fraksi PAN tersebut menyampaikan sejumlah faktor yang harus dilakukan untuk menghasilkan bahan bakar rendah karbon, salah satunya dengan meng-*upgrade* kilang-kilang yang dimiliki Pertamina.

“Untuk BBM rendah sulfur ini *kan* tentunya harus dilakukan upaya revitalisasi kembali kilang-kilang yang dimiliki oleh Pertamina. Untuk Sulawesi, suplainya mayoritas dari kilang di Balikpapan dan Cilacap. Kilang-kilang ini masih diupayakan menghasilkan BBM rendah sulfur,” ujar Andi Yuliani Paris. — qq/rdn

Scan QR untuk berita selengkapnya



Rekomendasikan Pansus Penyelesaian Peremajaan Sawit



FOTO: SHN/PDT

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII di Pontianak, Kalimantan Tengah, Jumat (20/09/2024).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mendorong pembentukan Pansus dalam mengatasi masalah *replanting* (peremajaan) kebun kelapa sawit yang ternyata menyulitkan petani. Pembentukan Pansus ini sangat dimungkinkan mengingat penyelesaian dalam masalah ini melingkupi lintas kementerian, tidak terbatas pada mitra Komisi VII saja.

“Kita akan membuat rekomendasi untuk teman-teman (DPR) periode

selanjutnya. Apakah (persoalan peremajaan) ini perlu ditingkatkan menjadi pansus karena ini terkait dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perindustrian. Jadi memang ini (perlu) ada keterkaitan dengan tiga komisi,” ujar Maman Abdurrahman usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII di Pontianak, Kalimantan Tengah, Jumat (20/9).

Replanting atau peremajaan kebun sawit merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keberlanjutan di industri sawit, sekaligus

meningkatkan hasil kebun dan kualitas buah sawit tanpa membuka lahan baru. Peremajaan kebun sangat dianjurkan untuk dilakukan pada perkebunan kelapa sawit yang telah mencapai usia puncak, yaitu sekitar 25 tahun.

Solusi itu, kata Maman, sangat penting dilakukan mengingat akibat negatif dari terhambatnya proses *replanting* ini sangat krusial. Selain berdampak langsung pada produktivitas sawit, juga akan mempengaruhi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal itu mengingat sawit adalah salah satu PNBP terbesar di Indonesia.

— syn/rdn



Scan QR untuk berita selengkapnya

Serahkan Bantuan Bagi Masyarakat Rentan



FOTO: GER/PDT

Anggota Komisi VIII DPR RI Moekhlas Sidik saat menyerahkan bantuan dalam kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, Kamis (12/9/2024).

Komisi VIII DPR RI bersama perwakilan Kementerian Sosial RI (Kemensos) memberikan bantuan sosial (bansos) kepada Pemerintah Kota Depok. Salah satunya, yaitu menyerahkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) kepada masyarakat rentan. Anggota Komisi VIII DPR RI Moekhlas Sidik menjelaskan, bahwa bantuan tersebut diberikan untuk masyarakat yang membutuhkan di Kota Depok.

Moekhlas mengatakan Bantuan yang disalurkan meliputi pemenuhan hidup layak untuk 21 penerima manfaat dan alat bantu untuk 16 penerima manfaat.

Bentuk bantuan tersebut termasuk kursi roda, tongkat, dan sembako.

"Kami berharap bantuan ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membantu mereka dalam kegiatan sehari-hari," ujarnya di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, Kamis (12/9).

Moekhlas mengatakan Komisi VIII DPR RI siap menampung aspirasi masyarakat Depok sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Komisi VIII DPR RI memiliki tujuh mitra kerja, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Penanggulangan Bencana, Badan

Wakaf Nasional, Badan Zakat Nasional, dan Badan Keuangan Haji.

"Jika ada kebutuhan atau masalah yang berkaitan dengan mitra kerja kami, masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya, dan kami akan meneruskan hal tersebut kepada menteri terkait untuk ditindaklanjuti," jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Imam Budi Hartono menjelaskan, Pemkot Depok terus memberikan perhatian kepada masyarakat, salah satunya terkait masalah kesejahteraan keluarga. Program yang sudah berjalan di antaranya melalui Kartu Depok Sejahtera (KDS) yang memiliki tujuh manfaat layanan. [go/rdn](https://go.rdn)

Scan QR untuk berita selengkapnya



Dorong Baznas Tingkatkan Layanan Aplikasi



FOTO: TN/PDT

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq saat Kunjungan Kerja Komisi VIII di Islamic Center, Kota Bekasi, Kamis (12/9/2024).

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) perlu mengembangkan pengelolaan zakat sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu langkah kreatif yang dapat dilakukan adalah menerapkan pelayanan berbasis aplikasi agar menarik dan mempermudah masyarakat dalam menyampaikan zakatnya.

“Untuk menarik minat masyarakat membayar zakat Baznas harus meningkatkan kualitas layanan berbasis aplikasi. Sehingga, masyarakat menjadi semakin tertarik dalam menunaikan zakat,” kata Anggota Komisi

VIII DPR RI Maman Imanul Haq dalam pertemuan dengan jajaran pimpinan Baznas Kota Bekasi, Jawa Barat di Islamic Center, Kota Bekasi, Kamis (12/9).

Maman mengakui bahwa untuk mencapai potensi besar tersebut tidaklah mudah. Menurutnya ada beberapa cara yang perlu dilakukan Baznas agar masyarakat muslim Indonesia menyalurkan zakatnya dengan optimal.

“Pertama, soal literasi pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap zakat dan keberadaan lembaga zakat. Kedua, peran Baznas dalam

mengedukasi dan mempromosikan masih kurang,” ujarnya.

Selanjutnya, Maman menilai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat masih sangat rendah. Karenanya, perlu ada upaya peningkatan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga zakat.

“Antusias masyarakat dalam berislam tidak diikuti dengan kekuatan kita untuk menerima antusias tersebut. Contohnya, saat ini masyarakat ingin cari kemudahan disetiap pembayaran zakat, kita sebagai pihak yang menyediakan harus mampu memenuhinya,” tuturnya. — **tn/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan Jadi Kunci



FOTO: DEP/PTT

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetyani usai menerima audiensi *Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC)* dan *Center For Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI)* terkait dukungan penguatan pengendalian konsumsi produk tembakau di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/8/2024).

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetyani menyoroti soal hubungan industri rokok dan sektor kesehatan di Indonesia. Ia menilai perlu adanya kolaborasi antarberbagai kementerian sekaligus pemangku kebijakan terkait untuk menangani potensi dampak negatif dari pengendalian konsumsi rokok. Kolaborasi, menurutnya, memainkan peran yang krusial agar industri rokok tetap hidup dan terkendali dengan menekan risiko kesehatan generasi bangsa.

Dirinya menyatakan bahwa keberhasilan inisiatif kolaborasi ini juga sangat

bergantung pada kemauan politik (*political will*) dari pimpinan tertinggi, terutama Presiden Republik Indonesia. Sebab itu, ia mendorong Kementerian Kesehatan harus ber-sinergi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan dalam merumuskan kebijakan fiskal dan non-fiskal yang mendukung transisi ini.

Salah satu isu utama yang perlu dipertimbangkan adalah dampak terhadap petani tembakau, yang berisiko berkurangnya pemasukan. "Perlu kajian tentang apa yang bisa dilakukan petani tembakau, apakah ada alih usaha yang bisa dilakukan dan

jenis pelatihan apa yang diperlukan," ungkap Netty menerima audiensi *Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC)* dan *Center For Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI)* di Senayan, Jakarta, Selasa (24/9).

Politisi Fraksi PKS itu menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam bentuk permodalan dan pelatihan keterampilan untuk membantu para petani beralih ke usaha lain. Dengan pendekatan yang terintegrasi, diharapkan peralihan ini dapat dilakukan secara bertahap, meminimalisasi dampak negatif bagi pekerja di industri rokok. — [um,naf/rdn](#)

Scan QR untuk berita selengkapnya



Persepsi Negatif Jadi Tantangan Imunisasi



FOTO: SRW/PDT

Tim Kunsfik Komisi IX DPR RI saat foto bersama usai pertemuan di Kantor Wali Kota Tangsel, Jumat (19/9/2024).

Komisi IX DPR RI menyroti pelaksanaan agenda Bulanan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) di Tangerang Selatan (Tangsel), Banten. Pelaksanaan program tersebut bukan tanpa tantangan dan kendala meski dilakukan di kota-kota besar. Masih adanya persepsi negatif, minimnya edukasi, serta pemikiran tradisional di lingkup masyarakat akan imunisasi rutin menjadi salah satu kendala belum tercapainya cakupan 100 persen anak-anak Indonesia mendapat imunisasi.

Dalam rapat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) yang dilaksanakan di Kantor Wali Kota Tangsel, Jumat

(19/9), Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan masih adanya perspektif tradisional orang tua akan imunisasi bagi anak. Hal itu, menurutnya, menjadi gajalan tersendiri akan keberhasilan capaian vaksin serta upaya menekan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) seperti hepatitis B, poliomyelitis, tuberkulosis, dan difteri.

“Apakah di Tangerang Selatan ini masih ada perspektif tradisional yang tidak mau anaknya diimunisasi? Sebab kalau masih ada, itu akan menjadi tantangan. Karena dari segi usia, memang anak butuh untuk imunisasi,” ucapnya dalam rapat yang dihadiri oleh Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga

lchsan dan *stakeholder* terkait.

Pemerintah telah menetapkan imunisasi rutin lengkap sebagai prasyarat pendaftaran masuk Sekolah Dasar melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri Tahun 2022 antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Koordinasi tersebut untuk memastikan setiap sekolah memasukkan BIAS sebagai kegiatan wajib Unit Kesehatan Sekolah (UKS), sehingga adanya kesadaran dari orang tua untuk mengimunisasi anak-anaknya.

— srw/rdn

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Sekolah Gagal Deteksi Dini Tindakan Perundungan

I su perundungan saat ini mengalami tren kenaikan yang sangat tinggi. Mirisnya, tindakan biadab ini banyak terjadi di lembaga satuan pendidikan, baik di level SD, SMP, SMA bahkan hingga di perguruan tinggi, yakni di salah satu program kedokteran spesialis.

Melihat tren kenaikan tindakan kasus perundungan tersebut, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai hal ini terjadi akibat sekolah gagal dalam melakukan tindakan preventif dalam mendeteksi dini potensi terjadinya perundungan. Padahal, diketahui, tindakan perundungan di sekolah ini banyak yang dilakukan secara berkelompok. Artinya seharusnya sekolah dapat membaca motif perundungan secara mudah.

“Tindakan preventif, tindakan pencegahan dini di lingkungan sekolah menurut saya gagal. Karena model *bullying* (perundungan) ini sebenarnya berkelompok bukan pribadi-pribadi atau per orang. Kalau tindakan ini orang per orang, dia



Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda saat diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema Mencari Format Pencegahan Kasus Perundungan di Lembaga Pendidikan di Ruang PPIP, Gedung Nusantara I, DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (24/09/2024).

FOTO: ARF/PDT

“

TINDAKAN PREVENTIF, TINDAKAN PENCEGAHAN DINI DI LINGKUNGAN SEKOLAH MENURUT SAYA GAGAL. KARENA MODEL BULLYING (PERUNDUNGAN) INI SEBENARNYA BERKELOMPOK BUKAN PRIBADI-PRIBADI ATAU PER ORANG. KALAU TINDAKAN INI ORANG PER ORANG, DIA SUSAH UNTUK DIDETEKSI.

Syaiful Huda
Ketua Komisi X DPR RI

susah untuk dideteksi. Tapi karena ini dilakukan secara bersama-sama sebenarnya kalau deteksi dini sekolah itu canggih, berkelanjutan, serius, dilakukan pengawasan secara terus-menerus, menurut saya tidak akan kebobolan,” ujarnya di Ruang PPIP, Gedung Nusantara I, DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (24/9).

Tak hanya sekolah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan jajaran dan dinas pendidikan juga belum baik dalam melakukan upaya yang terstruktur, sistematis dan masif dalam mencegah perundungan. Penanggulangan perundungan saat ini masih bersifat parsial dan sporadis, bahkan seringnya ‘no viral, no justice’.

gal/rdn

Scan QR untuk video selengkapnya



Scan QR untuk berita selengkapnya



Komisi X Akan Evaluasi Penyelenggaraan PON XXI 2024



FOTO: DEP/PDT

Anggota Komisi X DPR RI Rosiyati MH Thamrin dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (20/9/2024).

Anggota Komisi X DPR RI Rosiyati MH Thamrin menyatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dari penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 Aceh-Sumut. Di antaranya terkait masalah konsumsi makanan bagi para atlet serta persoalan kesiapan sarana dan prasarana *venue* yang digunakan selama penyelenggaraan PON XXI.

“Kita bersyukur bahwa penyelenggaraan PON ini telah selesai dan akan ditutup pada malam hari ini. Ada beberapa hal yang kita perlu evaluasi. Pertama, yaitu mengenai makanan untuk para atlet. Seperti kita ketahui, setiap atlet memerlukan asupan

makanan dengan kandungan nutrisi yang baik dan seimbang,” ungkap Rosi dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (20/9).

Hal lain yang juga menjadi sorotan Komisi X dari pelaksanaan PON XXI, lanjut Rosi, yakni mengenai kondisi *venue* acara yang masih belum rampung sepenuhnya. Ia berharap, penyelenggaraan PON XXI ini dapat dijadikan pembelajaran bagi pelaksanaan PON kedepannya agar tidak terulang lagi persoalan yang sama seperti yang terjadi pada tahun ini.

“Kita berharap PON ini menjadi evaluasi bagi PON - PON berikutnya. Sama dengan PON Papua lalu. Ada

permasalahan pembayaran, ada banyak sekali *venue-venue* yang terlantar dan itu semua memakai uang negara. Jadi saya berharap dalam melaksanakan PON kedepannya betul-betul kita melihat dengan seksama. Mungkin tidak usah lagi membangun gedung olahraga yang megah-megah dan setelah selesai PON *venue*-nya itu tidak terpakai lagi,” tutur Rosi.

Menurutnya, lebih baik jika memanfaatkan *venue-venue* yang sudah ada dan tidak lagi membangun baru prasarana yang lebih besar tapi cukup dengan melengkapi fasilitas yang dibutuhkan. Sehingga penyelenggaraannya tidak memerlukan biaya yang terlalu besar.

rep/rdn



Penyesuaian Anggaran BPKP dan BPS 2025



FOTO: FHN/PDT

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI dengan dua pimpinan lembaga penting, yaitu Plt Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dan Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti. RDP ini diselenggarakan di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9).

Agenda utama rapat ini membahas penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) untuk Tahun Anggaran 2025, yang telah disesuaikan dengan hasil

Badan Anggaran DPR RI. Rapat yang berlangsung selama kurang lebih satu jam ini menghasilkan beberapa keputusan penting yang akan berdampak langsung pada pengawasan keuangan negara dan penyediaan data statistik nasional.

“Komisi XI DPR RI menyetujui penyesuaian anggaran BPKP dan BPS untuk Tahun Anggaran 2025, dengan total alokasi masing-masing sebesar Rp2,473 triliun untuk BPKP dan Rp5,705 triliun untuk BPS. Penyesuaian ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan pada isu strategis nasional dan mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 serta Survei Penduduk

Antar Sensus (SUPAS),” papar Dolfie.

Dalam rapat tersebut, Komisi XI menyetujui penyesuaian anggaran BPKP dengan total alokasi sebesar Rp2,473 triliun. Anggaran ini mengalami peningkatan sebesar Rp210 miliar dari anggaran awal, yang semula sebesar Rp2,263 triliun. Penambahan anggaran ini diarahkan untuk memperkuat pengawasan pada berbagai isu strategis nasional, termasuk akuntabilitas keuangan, pembangunan sumber daya manusia berkualitas, infrastruktur, transformasi ekonomi, ketahanan pangan, energi berkelanjutan, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. — **ssb/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Kagumi Konten Aspirasi, Peserta Lokas Kreatif!

Lomba Konten Aspirasi (Lokas) yang diselenggarakan Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, berhasil menjaring aspirasi dari 262 peserta dari Sabang sampai Merauke. Ketua Dewan Juri, Puteri Annetta Komarudin, yang juga Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, mengaku kagum dengan cara peserta dalam menyampaikan aspirasi.

“Konten yang disampaikan peserta Lokas sangat kreatif. Semoga bisa menginspirasi masyarakat bahwa aspirasi bisa disampaikan secara kreatif dan mendorong kami di DPR untuk terus berkreasi. Sehingga, penyampaian kami sebagai penyambung lidah masyarakat dalam menyelesaikan isu-isu yang disampaikan di gedung DPR ini, bersama pemerintah dan pihak terkait, bisa lebih optimal,” kata Puteri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9).



FOTO: RSB/PDT

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Puteri Annetta Komarudin saat menjadi Ketua Dewan Juri Lomba Konten Aspirasi (Lokas) yang diselenggarakan Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, di Senayan, Jakarta.

Legislator Dapil Jabar VII ini melakukan penjurian bersama

Andromeda Mercury, praktisi media/presenter TVOne, dan Indra Pahlevi, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI, Indra Pahlevi. Sejumlah isu menjadi perhatian peserta Lokas, di antaranya mahal biaya pendidikan di Indonesia, ironi banyaknya sampah makanan, kasus kekerasan pada anak, investasi bodong, dan pinjaman online (pinjol) ilegal.

Dewan juri memutuskan pemenang Juara I Lokas adalah Alvin Rifaldi, mahasiswa dari Provinsi D.I. Yogyakarta, Lucia Amelia Cuaca, pelajar dari Provinsi Bali, dan Dino Dinasty Hariyanto, mahasiswa dari Provinsi Banten. Lokas menyediakan sejumlah hadiah bagi pemenang, yaitu trofi Lokas, uang pembinaan, bingkisan, serta sertifikat dengan total nilai 25 juta rupiah. **iky/aha**

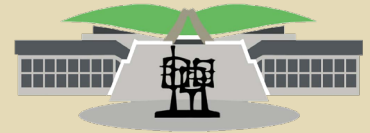
SEMOGA BISA MENGINSPIRASI MASYARAKAT BAHWA ASPIRASI BISA DISAMPAIKAN SECARA KREATIF DAN MENDORONG KAMI DI DPR UNTUK TERUS BERKREASI. SEHINGGA, PENYAMPAIAN KAMI SEBAGAI PENYAMBUNG LIDAH MASYARAKAT DALAM MENYELESAIKAN ISU-ISU YANG DISAMPAIKAN DI GEDUNG DPR INI, BERSAMA PEMERINTAH DAN PIHAK TERKAIT, BISA LEBIH OPTIMAL.

Puteri Annetta Komarudin

Anggota Komisi XI DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya





**Peringatan Maulid
Nabi Muhammad
SAW di Masjid
Baiturrahman,
Senayan, Jakarta,
Selasa (24/9/2024)
FOTO: CAN/PDT**

